

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi satu hal yang penting untuk menjaga stabilitas perusahaan yang bisa berdampak pada roda perekonomian bangsa. Pemerintah telah menetapkan peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pekerja yang tertuang dalam UU No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 dalam pasal 86-87 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja (Tampubolon, 2015).

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sebagai bentuk pengendalian risiko untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Berdasarkan PP No.50 tahun 2012 pasal 10 setiap pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana. Sumberdaya manusia memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat, dan kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan penunjuk dari instansi yang berwenang. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja setiap perusahaan dibuat dan dijalankan untuk dapat mewujudkan tujuan aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

Pelaksanaan kebijakan K3 pada kenyataannya masih sering diabaikan dan hanya dianggap sebagai pelengkap syarat berdirinya suatu kegiatan industri. Dampaknya terjadi kecelakaan kerja dan terpaparnya penyakit akibat kerja pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi. Penyebab kecelakaan kerja menurut Suma'mur (2009) disebabkan oleh dua hal yaitu *human unsafe action* dan *unsafe condition*. Menurut ILO (2013) setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja

meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Angka kecelakaan kerja menurut BPJS (2016) bahwa ada 101.367 kasus di 17.069 perusahaan dari 359.724 perusahaan yang terdaftar dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.382 orang.

Safety management system perusahaan industri memiliki kebijakan pengendalian yang dapat dilakukan melalui penerapan ijin kerja (*safety permit*), identifikasi risiko dengan *Job Safety Analysis*, pengenalan dasar / orientasi program HSE di suatu perusahaan (*safety induction*), pelatihan kompetensi, pelatihan HSE wajib (*Mandatory*) dan pemeriksaan kesehatan pekerja. Beberapa hal yang berkaitan dengan surat ijin kerja adalah faktor manusia, sistem manajemen K3, kompetensi, jenis pekerjaan, bahaya yang tersedia di tempat kerja. Penilaian terhadap kompetensi, kondisi kesehatan, dan analisa bahaya dan risiko di tempat kerja dapat dijadikan pertimbangan perusahaan dalam mempekerjakan karyawan, dan bagi pekerja mendapatkan ijin untuk bekerja atau memasuki wilayah tersebut (HSE, 2016).

Surat ijin kerja diberikan pada jenis pekerjaan yang mengandung sumber bahaya. Tujuan surat ijin kerja adalah untuk mencegah kecelakaan melalui pengawasan secara langsung pekerjaan di lapangan. Dampak yang terjadi apabila tidak adanya ijin kerja, pekerja tidak dapat bekerja. Faktor yang mempengaruhi surat ijin kerja adalah apakah pekerja telah menerima informasi, instruktur dan pelatihan untuk meminimalisir kesalahan operasi oleh manusia, surat ijin kerja berisikan beberapa informasi tentang jenis pekerjaan yang akan dilakukan, bahaya di tempat kerja, dan kompetensi serta keadaan sehat pekerja. Berdasarkan tentang surat ijin kerja, JSA, keterangan kesehatan pekerja, sertifikasi kompetensi pekerja, dan pengetahuan dasar keselamatan dan kesehatan kerja, di bentuklah suatu program *HSE Passport* (HSE, 2016).

Penerapan program perizinan yang komprehensif membantu mencegah terjadinya beberapa insiden yang tidak diinginkan. Namun kekurangan dalam menerapkan sistem izin kerja menjadi faktor dalam beberapa kecelakaan seperti yang terjadi pada Piper Alpha pada tahun 1988. Survei HSE Inggris menunjukkan bahwa sepertiga dari semuanya kecelakaan di industri kimia terkait perawatan, penyebab tunggalnya adalah kurangnya manajemen dalam *permit to work system* (Reddy, 2015).

PT Pertamina sebagai perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bangsa senantiasa menempatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagai faktor yang paling utama. Sesuai rencana strategis PT Pertamina EP untuk menjadi perusahaan minyak dan gas berkelas dunia, fungsi HSSE telah melakukan beberapa langkah strategis untuk mendukung *Operating Excellence* dengan indikator tanpa kecelakaan kerja, ramah lingkungan, tanpa gangguan operasi, dan tanpa penyakit akibat kerja. Tim HSSE *Short Time Program* bertugas melaksanakan tujuan tersebut melalui implementasi program-program keselamatan kerja, salah satu diantaranya adalah *HSE Passport* (Pertamina, 2012).

HSSE (*Health, Safety, Secure, and Environment*) *Passport* adalah buku yang berisi identifikasi kualifikasi pengetahuan HSE individu, sertifikasi kompetensi, kesehatan (*medical check-up*), riwayat khusus dan aspek HSE lainnya yang merupakan salah satu syarat memasuki wilayah dan melakukan kegiatan di lingkungan kerja PT Pertamina EP bagi pekerja, pekarya/mitra kerja dan tamu. Berdasarkan peraturan penerapan HSE Passport sebagai sistem ijin kerja memiliki keterkaitan segala jenis kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi, termasuk surat ijin kerja aman, *job safety analysis* untuk memberitahu kepada pekerja mengenai jenis dan potensial bahaya yang akan dihadapi pada saat bekerja atau memasuki area kerja PT Pertamina (PT Pertamina EP, 2014).

Pembangunan dalam era globalisasi dan industrialisasi semakin meningkat seiring berjalannya waktu yang meliputi proses dan teknologi canggih. Kemajuan era industrialisasi perlu diimbangi dengan adanya penerapan aspek keselamatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Setiap pekerjaan mempunyai risiko, baik terhadap keselamatan maupun kesehatan tenaga kerja, sehingga pemahaman mengenai aspek K3 merupakan hal yang mutlak diketahui oleh setiap tenaga kerja. Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja (K3) merupakan bagian integral dari setiap kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja (Gunawan, 2015).

Program HSE Passport PT Pertamina EP telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dalam bentuk buku, namun belum dilakukan evaluasi dalam implementasinya dilapangan terhadap efektifitas karyawan. Pada saat pelaksanaan dilapangan ditemukan beberapa kendala yaitu pekerja lupa membawa *HSE Passport*, hilangnya buku *HSE*

passport, buku *HSE passport* rusak dan tidak valid. Karena *HSE passport* merupakan bukti ijin bekerja (*permit to work*) dengan tidak adanya *HSE passport* mengakibatkan pekerja tersebut tidak diijinkan untuk masuk area proyek, hal ini berakibat pada meruginya perusahaan karena menurunnya produktifitas kerja dari *time line* proyek yang mundur. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan membutuhkan kajian sebagai dasar untuk melakukan perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut. Penanganan kendala yang terjadi melibatkan beberapa divisi yang saling berhubungan antara lain aspek manusia ditangani oleh *Human Resourch division*, aspek sosial ditangani oleh bagian *Legal*, aspek *supply chain* ditangani oleh *Supply Chain Division* dan aspek Keselamatan ditangani oleh *HSE division*. Berdasarkan uraian kendala tersebut, peneliti tertarik memilih penanganan kendala dari sisi HSE dengan judul “Analisa Hubungan Implementasi Program *HSE Passport* Dengan Efektivitas Karyawan Untuk Peningkatan Produktifitas Di PT. Pertamina *Exploration Production Ramba Field*”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terjadi kendala dalam pelaksanaan *HSE passport* di PT. Pertamina *Exploration Production Ramba Field*.
2. Terdapat hubungan antara implementasi program *HSE passport* dengan efektivitas karyawan.
3. Dibutuhkan tindakan untuk menangani kendala tersebut agar produktifitas meningkat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja kendala yang terjadi dalam penerapan *HSE Passport* Buku di PT. Pertamina *Exploration Production* ?

2. Bagaimana hubungan antara penerapan *HSE Passport* dengan efektifitas karyawan ?
3. Bagaimana solusi yang diambil untuk memperbaiki kendala yang terjadi ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk meninjau penerapan dari *HSE passport* di PT Pertamina *Exploration Production*
2. Untuk menganalisa hubungan dalam penerapan *HSE passport* dengan efektifitas karyawan
3. Untuk merumuskan solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini diharapkan tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan untuk itu diberikan batasan - batasan masalah yaitu :

1. Penelitian dilakukan di lingkungan PT Pertamina *Exploration Production*
2. Penelitian dilakukan pada bagian HSE PT Pertamina *Exploration Production*
3. Penelitian efektivitas implementasi *HSE passport* dinilai berdasarkan efektivitas karyawan dalam bekerja.
4. Observasi implementasi penerapan dilakukan terhadap pekerja, TKJP, dan kontraktor
5. Penggunaan data - data sekunder pada penelitian diambil dari Departemen HSE PT Pertamina *Exploration Production*

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Bagi Perusahaan

Adapun manfaat penelitian bagi perusahaan adalah :

1. Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam pelaksanaan program HSE passport buku (manual)
2. Memberikan gambaran terkait efektifitas pelaksanaan program HSE passport buku (manual)
3. Sebagai dasar pembuatan standar pelaksanaan implementasi program HSE passport

1.6.2 Manfaat Bagi Institusi

Adapun manfaat penelitian bagi institusi adalah dapat dijadikan referensi terhadap penelitian ke depannya dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik.

1.6.3 Manfaat Bagi Peneliti

Adapun manfaat dari penelitian bagi peneliti adalah dapat memperluas pengetahuan dalam penerapan HSE *passport* di lingkungan kerja dan sebagai referensi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya

1.7 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian dilaksanakan di :

Nama perusahaan : PT Pertamina *Exploration Production* Ramba Field

Alamat : Rambajaya, Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin,
Sumatera Selatan

Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2018

1.8 Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data antara lain :

1. Observasi Langsung

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

2. Wawancara Langsung

Melakukan wawancara atau tanya jawab langsung kepada pihak – pihak yang dapat memberikan keterangan dan bantuan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.

3. Data Sekunder

Data sekunder berupa SOP alur pembuatan *HSE passport*, jumlah pemegang *HSE passport* dan laporan HSE didapat dari departemen HSE PT Pertamina *Exploration Production*.

4. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mempelajari sistem penerapan HSE untuk industri *oil and gas*.

1.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi dasar – dasar teori dan metode yang dipergunakan sebagai dasar dan alat pemecahan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai metode atau cara dalam melakukan penelitian ini, mulai dari pendahuluan, identifikasi masalah, studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan data hingga pada penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pengumpulan dan pengolahan data serta analisa dan interpretasi.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran – saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

